RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 – 2022

DAFTAR ISI……		01
BAB.1	PENDAHULUAN……	02
	1.1 Latar Belakang…….	02
	1.2 Landasan Hukum……	02
	1.3 Maksud dan Tujuan…….	03
	1.4 Sistematika Penulisan…….	04
BAB.2	GAMBARAN PELAYANAN SKPD…….	05
	2.1 TUPOKSI……..	05
	2.2 Sumber Daya SKPD……..	06
	2.3 Kinerja Pelayanan SKPD……...	07
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD……	09
BAB.3	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI..	11
	3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD……	11
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota..	11
	3.3 Telaahan renstra K/L…….	12
	3.4 Telaahan rencana tata ruang……..	12
	3.5 Penentuan isu strategis…….	13
BAB.4	VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN……	14
	4.1 Visi dan Misi SKPD……..	14
	4.2 Tujuan dan sasaran,beserta indikator kinerjanya……	14
	4.3 Strategi dan Kebijakan……	17
BAB.5	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOKSASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF……	20
BAB.6	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD……	29
BAB 7	PENUTUP……	32

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 – 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Plh. Walikota/Wakil Walikota terpilih periode 2017- 2022 menetapkan visi pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022 yaitu mewujudkan Pematangsiantar yang MANTAP, MAJU, dan JAYA.

Mantap dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu menberikan andil dalam pembangunan daerah.

Maju dalam arti kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik disektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, social dan budaya masyarakat Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Jaya dalam arti hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah kota dan masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan.

Untuk mendukung visi Walikota dan Wakil Walikota tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar menyusun Rencana Strategis (renstra) dengan menetapkan target "**Mewujudkan Sistem Transportasi Darat yang Efektif dan Efisien**".

Target capaian dimaksud direncanakan melalui penerapan standar baku pelayanan lalu lintas jalan, penerapan standar baku tertib pelayanan angkutan umum serta penerapan standar baku ketersediaan sarana dan prasarana, alat kelengkapan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4293);

4. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud : Penyusunan renstra ini dimaksudkan untuk menggambarkan arah dan tahapan kegiatan pembangunan transportasi di Kota Pematangsiantar dalam kurun waktu 2017- 2022 yang pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- Tujuan : Sebagai alat kontrol untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan

4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB.1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB.2 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 TUPOKSI

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB.3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan program Kepala daerah dan wakil terpilih

3.3 Telaahan renstra K/L

3.4 Telaahan rencana tata ruang

3.5 Penetuan isue strategis

BAB.4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.2 Tujuan dan sasaran,beserta indicator kinerjanya

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB.5 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,INDIKATOR, KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF;

BAB.6 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB 7 PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- TUGAS POKOK

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perhubungan, mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan);
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)
d. Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal
e. Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor
f. Pengaturan lokasi tempat – tempat penyeberangan jalan
g. Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
h. Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum.
i. Pengadaan, penetapan, pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas serta tanda – tanda jalan.
j. Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.
k. Pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, trayek angkutan, trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan.
l. Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur.
m. Penetapan larangan pengunaan jalan – jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
n. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota dengan persetujuan Polres,

Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.

o. Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kota, jalan Propinsi dan jalan nasional yang berada dalam wilayah kota.

p. Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan penggunaan jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor tertentu

q. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan wilayah kota.

r. Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan.

s. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan .

t. Penetapan tarif untuk angkutan darat dalam jaringan trayek kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

u. Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

v. Penyelenggaraan bina usaha angkutan orang dan barang.

w. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Susunan organisasi dinas perhubungan terdiri dari:

a. Kepala dinas

b. Sekretariat

c. Bidang perhubungan darat

d. Bidang tehnik sarana dan prasarana

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub bagian umum dan kepegawaian

b. Sub bagian program dan keuangan

Bidang perhubungan darat terdiri dari :

a. Seksi manajemen lalu lintas dan angkutan jalan

b. Seksi pengendalian operasional dan pembinaan keselamatan

Bidang teknik sarana dan prasarana terdiri dari :

a. Seksi perbengkelan dan pengujian kendaraan bermotor

b. Seksi terminal dan parkir dan perlengkapan jalan

2. SUMBER DAYA SKPD

KEPEGAWAIAN

a. Jabatan Struktural Eselon II/b : 1 Orang

b. Jabatan Struktural Eselon III/a : 1 Orang

c.	Jabatan Struktural Eselon III/b	: 2 Orang
d.	Jabatan Struktural Eselon IV/a	: 6 Orang
e.	Tenaga Harian Lepas (THL)	: 122 Orang

GOLONGAN PNS

a.	Golongan IV	: 4 Orang
b.	Golongan III	: 22 Orang
c.	Golongan II	: 90 Orang
d.	Golongan I	: 6 Orang
	Jumlah	**122 Orang**

STRATA PENDIDIKAN PNS

a.	Magister (S2)	: 2 Orang
b.	Sarjana	: 13Orang
c.	Sarjana Muda	: 3 Orang
d.	SLTA	: 97 Orang
e.	SLTP	: 2 Orang
f.	SD	: 5Orang
	Jumlah	**122 Orang**

PERLENGKAPAN

Barang/perlengkapan pendukung kegiatan tugas-tugas Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar :

a.	Kendaraan Roda 4 Mini Bus Mobil Voorijdeers	: 1Unit
b.	Kendaraan Roda 4 Bus	: 1 Unit
c.	Kendaraan Roda 4 Pic Up Mobil Patroli	: 4Unit
d.	Kendaraan Roda 2 Sepeda Motor PATWAL	: 2 Unit
e.	Kendaraan Roda 2 Transportasi Dinas	: 1 Unit
f.	Komputer	: 4 Unit
g.	Laptop	: 16 Unit

3. KINERJA PELAYANAN SKPD

a. Program dan Kegiatan Tahun 2017

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-	Penyedian jasa surat menyurat	Rp.	500.000,00
-	Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp.	53.400.000,00
-	Penyedia jasa kebersihan kantor	Rp.	2.800.000,00
-	Penyedia alat tulis kantor	Rp.	13.987.094,00
-	Penyedian barang cetakan dan penggandaan	Rp.	234.776.000,00

-	Penyedian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	1.000.000,00
-	Penyedian makanan dan minuman	Rp.	4.000.000,00
-	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp.	85.000.000,00
-	Penyedian jasa pelayanan THL/PNS daerah	Rp.	2.501.100.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan prasana aparatur			
-	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp.	80.000.000,00
-	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Rp.	5.100.000,00
-	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Rp	148.569.500,00
-	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp.	14.400.000,00
-	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana lalu lintas	Rp.	325.000.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
-	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp.	33.660.000,00
4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan			
-	Studi pengembangan sarana dan prasarana bidang perhubungan	Rp.	20.000.000,00
5. Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas			
-	Pengadaan marka jalan	Rp.	514.500.000,00
-	Operasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (Operasi Lilin)	Rp.	66.005.000,00
-	Operasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas (Operasi ketupat)	Rp.	66.005.000,00
-	Operasional Barkotib Lantas	Rp.	5.330.000,00
	Jumlah :	**Rp.**	**4.175.132.594,00**

b. Exsisting Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Traffic light	: 9 unit
2. Rambu Pendahulu penunjuk Jalan	: 12 unit
3. Rambu-rambu Lalu Lintas	: 423
4. Marka Jalan	: 12 meter
5. Zebra cross	: 625 meter
6. Stop Line	: 0
7. Jembatan Penyeberangan	: 2
8. Quard rail	: 15 meter
9. Shelter/halte	: 23 Lokasi
10. Jaringan trayek	: 161 trayek
11. Terminal tipe A	: 1 unit
12. Pengujian Kendaraan Bermotor (manual)	: 1 unit

- Fasilitas transportasi umum:
  1. Mobil Penumpang Umum (MPU) : 3.428 unit
  2. Mobil Bus Kota : 141 Unit
  3. Mobil Barang : 1.316 Unit
  4. Taksi : 0
  5. Beca Bermmotor : 109 unit
  6. Angkutan Sewa : 50 unit
- Panjang Jalan:
  1. Jalan arteri primer : 3 Ruas sepanjang 16,6 km
  2. Jalan kolektor primer : 19 ruas sepanjang 15,01 km
  3. Jalan local sekunder : 428 ruas sepanjang 211,296 km
  4. Jalan kolektor sekunder : 62 ruas sepanjang 69,45 km
  5. Jalan local : 11 ruas sepanjang 18,41 km
- Pertumbuhan jumlah kendaraan 3 tahun terakhir :

No.	Jenis kendaraan	Jumlah		
		2014	2015	2016
1.	Sedan	1.057	1.114	782
2.	Jeep	2.248	2.406	1.825
3.	Bus, mikro bus	860	917	727
4.	Mini bus	11.099	12.434	9.989
5.	Truck / Pick up	8.554	9.013	7.055
6.	Betor / R-3	408	180	109
7.	Sepeda Motor	89.362	97.968	76.588
8.	Alat-alat berat	47	43	30
	Jumlah	113.635	124.075	97.105

4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan dan peluang Dinas Perhubungan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang Mantap, Maju dan Jaya, dapat dilihat melalui analisis SWOT sebagai berikut :

- Kekuatan (Strength) :

a. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan antar wilayah

b. Tersedianya Terminal Tipe A Tanjung Pinggir

c. Potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

d. Penduduk yang terdiri dari beberapa etnis

e.Tersedianya lembaga pendidikan /perguruan tinggi

f. Kebijakan Pemerintah daerah yang berpihak kepada pembangunan transportasi

g. Adanya potensi jumlah kenderaan untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

h. Letak strategis wilayah kota yang diapit beberapa daerah kabupaten

- Kelemahan (Weakness) :
  a. Relatif kecilnya sumber PAD untuk membiayai sarana dan prasarana transportasi
  b. Adanya lokasi sekolah-sekolah di pusat kawasan bisnis
  c. Pedagang berjualan sampai kebadan jalan menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.
  d. Rambu-rambu lalu lintas masih kurang, dan masih minim ruas-ruas yang memiliki marka jalan dan zebra cross.
  e. Profesionalisme aparatur pengawasan lalu lintas masih rendah.
  f. Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) masih sangat minim

3. Peluang (Opportunity) yaitu :
   a. Pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi daerah dalam menentukan arah pembangunan transportasi.
   b. Pengembangan kawasan baru masih memungkinkan penataan transportasi yang lebih baik.
   c. Peran serta forum lalu lintas dan angkutan jalan raya dalam penanganan lalu lintas dan angkutan jalan.
   d. Alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi merupakan factor pendukung untuk mewujudkan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Hambatan (Treats) yaitu :
   a. Masih rendahnya kesadaran dan disiplin masyarakat berlalu lintas dijalan
   b. Pertambahan jumlah kendaraan bermotor dengan pertambahan panjang ruas jalan setiap tahun tidak seimbang
   c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam perencanaan dan pengelolaan lalu lintas angkutan jalan serta SDM yang professional di bidang LLAJ berupa tenaga survey angkutan dan lalu lintas yang memiliki pendidikan khusus dan tenaga penguji kendaraan bermotor.
   e. Belum optimalnya pengoperasian terminal Tanjung Pinggir.
   f. Alokasi anggaran pembangunan daerah untuk pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembangunan bidang perhubungan relative rendah.
   g. Belum tersedianya Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
   h. Penetapan lokasi-lokasi parkir yang belum diatur maksimal

BAB III
ISSU- ISSU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

- Kondisi geometric persimpangan yang kurang memadai untuk manuver kendaraan.
- Trotoar tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pedestrian, melainkan pot bunga, pedagang kaki lima sehingga menambah hambatan samping bagi pengendara maupun pejalan kaki.
- Pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan di ruas jalan
- Angkutan kota menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, sehingga perlu dibangun halte angkutan kota
- Masyarakat pengendara sering mengacuhkan traffic light.
- Parkir kenderaan roda 2 di trotoar depan pertokoan
- Belum ada peraturan tentang penetapan lokasi parkir
- Lahan parkir pusat pusat perbelanjaan pasar tradisionil ditempati pedagang sehingga tempat parker pengunjung pasar tradisionil ditempatkan di ruas jalan secara berlapis sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan umum.
- Simpul trayek angkutan kota terlalu panjang, sehingga perlu diatur kembali melalui Peraturan Daerah tentang Jaringan Trayek Angkutan Kota serta perlu dibangun terminal angkutan kota maupun angkutan perdesaan.
- Operasional fungsi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir kurang optimal
- Kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Kurangnya traffic light dan warning light
- Kurang optimalnya fungsi jembatan penyeberangan
- Belum adanya gedung dan peralatan mekanis pengujian kenderaan bermotor
- Manajemen sistem informasi pelayanan belum bebasis teknologi informasi
- Belum tersedianya terminal tipe c (terminal pembantu)

2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PERIODE 2017- 2022

Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Plh. Walikota/Wakil Walikota terpilih Periode 2017- 2022 memiliki visi pembangunan Kota Pematangsiantar Tahun 2017-2022 yaitu mewujudkan Pematangsiantar yang MANTAP, MAJU, dan JAYA.

Mantap dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam keadaan stabil sehingga mampu menberikan andil dalam pembangunan daerah.

Maju dalam arti kinerja pembangunan daerah ditandai oleh adanya laju pertumbuhan dan peningkatan grafik disektor-sektor prioritas yang secara langsung berdampak positif bagi

peningkatan kualitas kehidupan serta penguatan posisi daya saing ekonomi, social dan budaya masyarakat Pematangsiantar secara berkelanjutan.

Jaya dalam arti hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah kota dan masyarakat Pematangsiantar berhasil dengan sukses sesuai dengan target-target yang ditetapkan dalam kinerja pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi **" Pematangsiantar Mantap, Maju dan Jaya",** Pemerintah Kota Pematangsiantar menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih
2. Peningkatan Kwalitas Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Penguatan Sistem Ekonomi, UKM dan Koperasi
5. Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas Infrastruktur
6. Menata Sistem Pelayanan Publik Yang Lebih Baik dan Professional
7. Menata Sistem Alokasi Dana Penggunaan Anggaran yang Efisien dan Pro Rakyat

Untuk mendukung visi dan misi dimaksud, Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar berupaya mewujudkan sitem transportasi darat yang elektif dan efesien dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2022. Target capaian dimaksud direncanakan melalui penerapan standar baku pelayanan lalu lintas jalan, penerapan standar baku pelayanan angkutan umum serta penerapan standar baku ketersediaan sarana dan fasilitas pelayanan jalan.

3. TELAAHAN RENSTRA K/L

- Penyusunan Rencana Bidang Perhubungan Darat
- Penyelanggaraaan Kualifikasi Urutan Jasa Bidang Perhubungan Darat.
- Penyelenggaraan Sistem Perhubungan Darat.
- Penyelenggaraan dan Pengawasan Pendidikan Pelatihan Bidang Perhubungan.
- Penyelenggaraan Promosi Bidang Perhubungan Darat.
- Pengawasan Tekhnis Terhadap Pelaksanaan Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perhubungan Darat.
- Penyelenggaraan Kerja Sama Bidang Perhubungan.
- Pemberian Ijin dan Pengawasan Bengkel Kendaraan Umum.

3. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG

- Bangunan-bangunan di kawasan Pusat Kegiatan Bisnis (CBD) tidak melalui Study Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
- Pusat kegiatan pendidikan berada di kawasan Pusat Kegiatan bisnis
- Pembukaan jalan outer ring road belum terealisasi
- Penyalahgunaan izin kegiatan berdagang menjadi kegiatan bengkel service

4. PENENTUAN ISSU STRATEGIS

- Kondisi geometric persimpangan yang kurang memadai untuk manuver kenderaan.
- Fungsi trotoar sebagai fasilitas pedestrian ditempati pedagang kaki lima sehingga menambah hambatan samping bagi pengendara maupun pejalan kaki.
- Pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan di ruas jalan
- Angkutan kota menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, sehingga perlu dibangun halte angkutan kota
- Parkir kendaraan roda 2 di trotoar depan pertokoan
- Belum ada peraturan tentang penetapan lokasi parkir
- Lahan parkir pusat pusat perbelanjaan pasar tradisionil ditempati pedagang sehingga tempat parkir pengunjung pasar tradisional ditempatkan di ruas jalan secara berlapis sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas pengguna jalan umum.
- Operasional fungsi Terminal Tipe A Tanjung Pinggir kurang optimal
- Kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- Kurangnya traffic light dan warning light
- Belum adanya gedung dan peralatan mekanis pengujian kenderaan bermotor
- Belum tersedianya terminal tipe c (terminal pembantu)
- Rendahnya kualitas SDm

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI SKPD

VISI:

"Mewujudkan Sistem Transportasi Darat yang Efektif dan Efisien" dengan ciri pelayanan lalulintas angkutan jalan yang selamat, aman, tertib dan lancar di Kota Pematangsiantar.

Pengertian dari konsep visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kenderaan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolaannya.
- Kota Pematangsiantar adalah daerah otonomi yang menjadi objek dan sasaran penyelenggaraan di bidang perhubungan darat sector lalu lintas dan angkutan jalan.
- Selamat berarti suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia,kendaraan, jalan, dan / atau lungkungan.
- Aman, berarti suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan / atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan / atau rasa takut dalam berlalu lintas.
- Tertib berarti suatu keaadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- Lancar berarti suatu keaadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacatan dijalan.

MISI

- Penerapan standart baku pelayanan angkutan umum
- Penarapan standart baku manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas
- Penerapan standart baku pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan
- Penerapan kawasan percontohan pelayanan angkutan umum dan angkutan kota
- Peningkatan disiplin dan tertib berlalu lintas
- Penegakkan hukum secara konsisten dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN DAN SASARAN

- Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pelayanan jasa pada perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan);
- Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan pengelolaan dan pelayanan jasa dalam perhubungan darat (Lalu Lintas Angkutan Jalan)
- Pengawasan dan pengamanan pengelolaan pemeliharaan fisik dan ketertiban terminal

- Pengelolaan lokasi parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- Pengaturan lokasi tempat – tempat penyeberangan jalan
- Perumusan dan pelaksanaan aturan tentang pengangkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor dan tidak bermotor
- Pengelolaan lokasi dan tempat pemberhentian/halte untuk kendaraan umum.
- Pengadaan, penetapan, pengaturan penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas serta tanda – tanda jalan.
- Pemberian rekomendasi izin dan pengawasan bengkel umum untuk kendaraan bermotor.
- Pemberian rekomendasi izin usaha angkutan, trayek angkutan, trayek angkutan kota, insidentil dan dispensasi pemakaian jalan.
- Penetapan ketentuan – ketentuan tambahan mengenai susunan alat alat pada mobil bus dan mobil penumpang yang digunakan orang/barang secara tertib dan teratur.
- Penetapan larangan pengunaan jalan – jalan tertentu demi kelancaran arus lalu lintas, dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
- Pengaturan sirkulasi lalu lintas di wilayah daerah kota dengan persetujuan Gubernur untuk jalan Propinsi dan persetujuan pemerintah pusat untuk jalan nasional.
- Penetapan kecepatan maksimal bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan kota, jalan Propinsi dan jalan nasional yang berada dalam wilayah kota.
- Pelaksanaan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas serta larangan penggunaan jalan kota bagi jenis dan macam kendaraan bermotor tertentu
- Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat dan wilayah kota.
- Penyelenggaraan perlengkapan jalan pada jaringan jalan.
- Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan .
- Penetapan tarif untuk angkutan darat dalam jaringan trayek kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- Penyelenggaraan bina usaha angkutan orang dan barang.
- Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.
- Menciptakan keterpaduan langkah-langkah kebijakan dalam penanganan pembangunan transportasi. Sasarannya adalah kerjasama dengan instansi / lembaga terkait : Kementerian Perhubungan RI, Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Utara, Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, organisasi pengusaha angkutan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengedalian lalu lintas serta pencegahan kecelakaan lalu lintas. Sasarannya adalah penertiban operasional angkutan umum di jalan raya.
- Meningkatkan ketersediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan sarana keselamatan pengguna jalan meliputi ruang lalu lintas, terminal, perlengkapan jalan yang meliputi marka,

rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung lainnya. Sasarannya adalah kelengkapan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kota Pematangsiantar.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sasarannya adalah sosialisasi peraturan berlalu lintas kepada masyarakat dan anak-anak sekolah.

INDIKATOR DAN KINERJA

- Tersusunnya dokumen tatanan transportasi local Kota Pematangsiantar
- Terbitnya perda ttg Jaringan Trayek Angkutan Kota
- Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Optimalnya operasional Terminal Tanjung Pinggir
- Terpeliharanya gedung dan lingkungan terminal
- Tersedianya lahan terminal tipe c
- Terlaksananya pembangunan terminal tipe c
- Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan laporan
- Terpeliharanya pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)
- Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor
- Terpeliharanya prsarana pengujian kendaraan bermotor
- Penyuluhan bagi 500 orang sopir angkot
- Terlaksananya pengendalian peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan umum
- Displin berlalu lintas
- Operasi pengendalian dan pengawasan lapangan sebanyak 20 kali
- Tersedianya keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
- Berfungsinya halte angkutan umum
- Terlaksananya pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
- Tersedianya jasa kebersihan dilingkungan terminal
- Terciptanya pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
- Tersusunnya database pelayanan angkutan
- Terlaksanya fasilitasi perijinan dibidang perhubungan
- Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota
- Terselenggaranya pemilihan awak kendaraan terbaik
- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan
- Tersedianya sticker pengawasan
- Terbangunnya gedung terminal
- Tersedianya halte
- Tersedianya jembatan penyebrangan

- Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan
- Terselenggaranya koordinasi antar anggota Forum lalu lintas
- Terbangunnya 3 unit terminal angkutan kota
- Tersedianya 46 halte angkutan kota
- Tersedianya 4 unit jembatan penyebrangan
- Terpasangnya 3000 unit rambu lalu lintas
- Terpasangnya 26 km marka jalan
- Terpasangnya 16 unit traffic light
- Terpasangnya 8 unit warning light
- Terpasangnya pagar pengama jalan
- Terselenggaranya penertiban peredam kecut
- Terpeliharanya traffic light
- Terpeliharanya rambu lalu lintas
- Terselenggaranya Pamlalin Idul Fitri
- Terselenggaranya Pamlalin Tahun Baru
- Terselenggaranya Pamlalin pada hari-hari besar tertentu
- Tersedianya Lahan Dan Gedung Pengujian Kendaraan
- Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan
- Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan
- Pengujian 50.000 Kendaraan
- Tersedianya 5 Unit Mobil dan 6 unit sepeda motor operasional
- Tersedianya 150 kursi, 150 meja ½ biro, 30 lemari arsip
- Tersedianya 8 komputer PC dan 15 Laptop
- Tersedianya dokumen Renstra
- Tersedianya Dokumen Lakip, LKPJ, LPPD
- Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya
- Penyuluhan terhdap masyarakat
- Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat
- Terciptanya laporan prognosis realisasi anggaran
- Terrciptanya laporan keuangan akhir tahun
- Pengadaan lahan/tanah kantor Dinas Perhubungan
- Pengadaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Menigkatkan Produktivitas pelayanan Jasa Transportasi yang menunjang dan menggerakkan Ekonomi Masyarakat, Secara terpadu, tertib lancar dan efisien.

- Meningkatkan keandalan dan kemampuan Angkutan Umum
- Melaksanakan peningkatan Manajemen Perencanaan, Pemrograman, Operasional

Dan pengendalian angkutan umum

- Pembangunan Angkutan Umum Massal baru,
- Pengaturan Pratransit penumpang umum (Taksi, Beca Bermotor)
- Pengaturan terminasi Angkutan Barang
- Penetapan jaringan lintas mobil barang
- Perumusan manajemen lalu lintas dan bongkar muat angkutan barang
- Peningkatan kelancaran lalu lintas melalui upaya pemaksimuman penggunaan ruang jalan dan kapasitas ruas-ruas jalan yang telah ada.
- Peningkatan kapasitas persimpangan
- Peningkatan kapasitas ruas jalan
- Peningkatan kapasitas jaringan jalan
- Pengadaan lajur dan jalan khusus angkutan kota
- Melakukan pengendalian lalu lintas kendaraan
- Pengendalian dan pengawasan lau lintas dan angkutan jalan
- Mengoptimalkan penerimaam restribusi parkir, terminal dan angkutan
- Pengaturan perparkiran melalui penerapan standar penyimpanan kendaraan dan fasilitas parkir.
- Pengendalian kecelakaan lalu lintas.
- Menciptakan budaya tertib pelayanan angkutan umum
- Menciptakan budaya tertib pengguna jasa angkutan umum
- Meningkatkan keterpaduan antara pembangunan kawasan dan gedung dengan transportasi
- Penyusunan rencana induk transportasi tatanan transportasi local Kota Pematangsiantar yang terpadu dengan tatanan transportasi antar Kota dalam Propinsi maupun AntarPropinsi
- Penyusunan jaringan trayek angkutan umum yang terpadu dan menunjang pengembangan wilayah dan rencana tata ruang kota.
- Melakukan analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan kawasan dan gedung baru.

3.2. Menunjang mobilitas masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan penyediaan akses untuk segenap lapisan masyarakat dalam mencapai pusat-pusat kegiatan dan pelayanan perkotaan secara aman dan nyaman.

- Pengaturan dan pengadaan Fasilitas Pejalan Kaki
- Pengaturan dan pengadaan fasilitas pengguna kendaraan tidak bermotor
- Pengaturan dan pengadaan fasilitas untuk orangtu dan orang cacat.
- Penetapan jaringan jalan arteri primer, arteri skunder, kolektor primer dan kolektor Sekunder.

3.3. Memelihara dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup, melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang berwawasan lingkungan.

- Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas :
- Penyediaan marka dan rambu-rambu jalan yang mudah dimengerti
- Melaksanakan kampanye dan program pendidikan berlalu lintas
- Peningkatan pendidikan kepada petugas lalu lintas
- Peningkatan ketertiban pengemudi dan pejalan kaki
- Peraturan tentang sekolah pengemudi dan surat izin mengemudi
- Pengaturan tentang batas kecepatan kendaraan
- Pengaturan tentang keahlian kendaraan
- Standard kendaraan (termasuk emisi gas buang)
- Sistem registrasi kendaraan
- Sistem pengujian kendaraan bermotor
- Memelihara Estetika Kota

3.4. Memantapkan ketersediaan dan sumber pembiayaan kebutuhan penyedia jasa dan pembangunan prasarana transportasi, terutama melalui potensi-potensi masyarakat dan menciptakan iklim yang mendorong dan merangsang peran serta sektor swasta.

- Pembinaan sumber-sumber daya masyarakat, antara lain :
  a. Kebijakan pajak kendaraan
  b. Kebijakan tarif angkutan kota, parkir, retribusi penggunaan jalan, retribusi terminal.
- Kerjasama dengan pihak swasta (Public privat partner ship)

3.5. Memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antar instansi dalam rangka manajemen pembangunan transportasi .

- Menetapkan kerangka kelembagaan dan meningkatkan koordinasi antar instansi :
  a. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Pusat.
  b. Tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah
  c. Keterlibatan Pemko dalam pembinaan dan pelayanan kereta api kota
  d. Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kepolisian
  e. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pengusaha angkutan umum.

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program Pembangunan Dan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Penyusunan kebijakan, norma, standard dan prosedur bidang perhubungan
- Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
- Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat
- Pengadaan lahan terminal tipe c
- Pembanguan terminal tipe c
- Peningkatan pengelolaan angkutan darat
- Monitoring evaluasi dan pelaporan

2. Program Rehabilitas dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

- Rehabilitas /pemeliharaan alat pemberi isyarat lalu lintas (APIL)
- Rehabilitas /pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
- Rehabilitas /pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
- Rehabilitas /pemeliharaan terminal

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudi untuk penungkatan keselamatan penumpang
- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
- Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guma meningkatkan keselamatan penumpang
- Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
- Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal
- Kegiatan perataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
- Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal
- Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dam mudah
- Pengumpulan dan analisis data base pelayanan Angkutan
- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
- Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan Angkutan
- Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan

- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Angkutan
- Pengadaan sticker pengawasan

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Pembangunan terminal angkutan kota
- Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
- Pembangunan jembatan penyeberangan
- Pengadaan aplikasi informasi pelayanan perhubungan

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
- Pengadaan marka jalan
- Pengadaan pagar pengaman jalan
- Pengadaan traffic light
- Pengadaan warning light
- Forum lalu lintas
- Penertiban peredam kecut
- Pemeliharaan traffic light
- Pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas
- Operasi ketupat
- Operasi lilin
- Pamlalin hari – hari besar tertentu

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

- Pengadaan lahan PKB
- Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
- Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan operasional Dinas
- Pengadaan meubeler kantor
- Makan dan minuman petugas lapangan
- Pengadaan senter lalu lintas
- Pengadaan jas hujan
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyedia jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
- Penyedia jasa jaminan barang milik daerah
- Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyedia jasa administtrasi keuangan
- Penyedia jasa kebersihan kantor
- Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
- Penyedia logistik kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan jasa THL/ PNS daerah

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pembuatan Renstra
- Pembuatan Lakip, LKPJ dan LPPD

10. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan mesin kartu absensi
- Pengadaan pakaian dinas besrta kelengkapannya
- Pengadaan pakaian kerja lapangan
- Pengadaan pakaian korpri
- Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

11. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

- Pemulangan pegawai yang pensiun
- Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas
- Pemindahan tugas PNS

12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan pelatihan formal
- Pelatihan FMB(fisik, mental dan disiplin) dalam peningkatan pengamanan lalu lintas
- Sosialisasi peraturan perundang – undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan

13. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyususnan pelaporan progonosis realisasi anggaran

Berikut disajikan Tabel 5.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		0	1	2	3	4	5	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersusunnya dokumen tatanan transportasi local Kota Pematangsiantar	Belum ada	100%	-	-	-	-	100%
2	Terbitnya perda ttg Jaringan Trayek Angkutan Kota	1 dokumen	-	100%	-	-	-	100%
3	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
4	Optimalnya operasional Terminal Tanjung Pinggir	Belum optimal	-	-	100%	-	-	100%
5	Terpeliharanya gedung dan lingkungan terminal	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
6	Tersedianya lahan terminal tipe c	Belum ada			100%			100%
7	Terlaksananya pembangunan terminal tipe c	Belum ada			100%			100%
8	Tersedianya dokumen monitoring, evaluasi dan laporan	Belum ada		100%				100%
9	Terpeliharanya pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL)	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
10	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
11	Terpeliharanya prsarana pengujian kendaraan bermotor	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
12	Penyuluhan bagi 500 orang sopir angkot	Belum optimal	25%	25%	25%	25%	-	100%
13	Terlaksananya pengendalian peningkatan disiplin masyarakat dalam menggunakan angkutan umum	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
14	Displin berlalu lintas	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
15	Operasi pengendalian dan pengawasan lapangan sebanyak 20 kali	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
16	Tersedianya keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
17	Berfungsinya halte angkutan umum	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
18	Terlaksananya pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Belum ada		100%				100%
19	Tersedianya jasa kebersihan dilingkungan terminal	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
20	Terciptanya pelayanan cepat, tepat, murah dan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%

	mudah							
21	Operasional Petugas Pengawasan dan Pengendalian Lapangan 20 kali	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
22	Tersusunnya database pelayanan angkutan	Belum ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
23	Terlaksanya fasilitasi perijinan dibidang perhubungan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
24	Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
25	Terselenggaranya pemilihan awak kendaraan terbaik	Belum pernah	20%	20%	20%	20%	20%	100%
26	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan jasa angkutan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
27	Tersedianya sticker pengawasan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
28	Terbangunnya gedung terminal	Belum ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
29	Tersedianya halte	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
30	Tersedianya jembatan penyebrangan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
31	Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perhubungan	Belum ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
32	Terselenggaranya koordinasi antar anggota Forum lalu lintas	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
33	Terbangunnya 3 unit terminal angkutan kota	Belum ada	-	50%	50%	-	-	100%
34	Tersedianya 46 halte angkutan kota	23 unit	25%	25%	25%	25%	-	100%
35	Tersedianya 4 unit jembatan penyebrangan	2 unit	-	100%	-	-	-	100%
36	Terpasangnya 3000 unit rambu lalu lintas	423 unit	25%	25%	25%	25%	-	100%
37	Terpasangnya 26 km marka jalan	Belum Optimal	25%	25%	25%	25%	-	100%
38	Terpasangnya 16 unit traffic light	9 unit	25%	25%	25%	25%	-	100%
39	Terpasangnya 8 unit warning light	Belum optimal	25%	25%	25%	25%	-	100%
40	Terpasangnya pagar pengama jalan	Belum optimal	25%	25%	25%	25%	-	100%
41	Terselenggaranya penertiban peredam kecut	Belum optimal	25%	25%	25%	25%	-	100%
42	Terpeliharanya traffic light	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
43	Terpeliharanya rambu lalu lintas	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
44	Terselenggaranya Pamlalin Idul Fitri	Ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
45	Terselenggaranya Pamlalin Tahun Baru	Ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
46	Terselenggaranya Pamlalin pada hari-hari besar tertentu	ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%
47	Tersedianya Lahan Dan Gedung Pengujian Kendaraan	Belum ada	50%	50%	-	-	-	100%
48	Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan	Belum optimal	-	-	50%	-		100%
49	Terselenggaranya Pamlalin pada hari-hari besar tertentu	ada	20%	20%	20%	20%	20%	100%

50	Tersedianya Lahan Dan Gedung Pengujian Kendaraan	Belum ada	50%	50%	-	-	-	100%
51	Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan	Belum optimal	-	-	50%	-		100%
52	Pengujian 50.000 Kendaraan		10%	10%	20%	30%	30%	100%
53	Tersedianya 5 Unit Mobil dan 6 unit sepeda motor operasional	Belum optimal	50%	50%	-	-	-	100%
54	Tersedianya 150 kursi, 150 meja ½ biro, 30 lemari arsip	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
55	Tersedianya 8 komputer PC dan 15 Laptop	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
56	Tersedianya dokumen Renstra	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
57	Tersedianya Dokumen Lakip, LKPJ, LPPD	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
58	Meningkatan mutu pendidikan dan pelatihan normal	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
59	Terselenggaranya pelatihan FMD (fisik, mental, disiplin) dalam peningkatan pengamanan lalu lintas	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
60	Tersedianya pakaian kerja lapangan	Belum ada						100%
61	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	Belum ada						100%
62	Penyuluhan terhdap masyarakat	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
63	Terselenggaranya pelatihan teknis perhubungan darat	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
64	Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang akurat	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
65	Terciptanya laporanya keuangan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
66	Terciptanya laporan prognosis realisasi anggaran	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
67	Terrciptanya laporan keuangan akhir tahun	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
68	Pengadaan lahan/tanah kantor Dinas Perhubungan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%
69	Pengadaan Gedung Kantor Dinas Perhubungan	Belum optimal	20%	20%	20%	20%	20%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar ini menjadi pedoman bagi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya selama periode Renstra ini berjalan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas diharapkan Bidang-Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas mengacu kepada visi, misi tujuan strategi kebijakan program dan kegiatan-kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masimg-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis, Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemantauan atas penjabaran Renstra sekaliggus merupakan dasar evaluasi pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Demikian Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar Tahun 2017 - 2022 disusun untuk dapat dijadikan pedoman sebagaimana mestinya.

Pematangsiantar, Mei 2017

KEPALA DINAS

Drs. ESRON SINAGA, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc
NIP. 19671028 199303 1 003